eJournal Pembangunan Sosial, 2026, 14(4): 97-108
ISSN 0000-0000, ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2026

IMPLEMENTASI PROGRAM BEASISWA PT BHARINTO EKATAMA DI DESA MUARA BUNYUT, KECAMATAN MELAK, KABUPATEN KUTAI BARAT

Imelda Cristin [1], Kamilah Dwi Kurniawati, S.Sos., M.A.[2]

Abstrak

Desa Muara Bunyut, wilayah Ring I operasi PT Bharinto Ekatama, menghadapi keterbatasan akses pendidikan tinggi karena tidak adanya sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi, sehingga biaya pendidikan menjadi tinggi. Sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), PT Bharinto Ekatama menyelenggarakan program beasiswa bagi mahasiswa di wilayah binaan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses implementasi program tersebut di Desa Muara Bunyut, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan model kesesuaian tiga arah (three-way fit) David C. Korten, yaitu kesesuaian program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan studi dokumentasi terhadap sembilan informan yang dipilih secara purposif, meliputi pihak Community Development perusahaan, aparat desa, orang tua, dan mahasiswa penerima, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan implementasi berjalan cukup baik dengan tingkat keselarasan tinggi. Program dirancang sistematis dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), dikelola unit Community Development melalui perencanaan dua gelombang per tahun, disosialisasikan lewat Instagram, Google Form, dan pemerintah desa, serta menyasar mahasiswa binaan ber-IPK minimal 3,25. Program meringankan biaya kuliah dan meningkatkan motivasi belajar. Namun, ditemukan tiga celah: cakupan sasaran terbatas, peran pelaksana terfokus pada administrasi dan penyaluran dana tanpa pembinaan non-akademik, serta keberlanjutan program yang bergantung pada RKAB tahunan.

Kata Kunci: *implementasi program, beasiswa, CSR, model Korten, Muara Bunyut*

---

[1]Mahasiswa Program Studi S1 Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: imeldacristin27@gmail.com
[2]Dosen Pembimbing, Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Desa Muara Bunyut, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, menempati posisi geografis yang strategis di sepanjang aliran Sungai Mahakam. Kawasan ini menjadi jalur perlintasan, pemuatan (*jetty*), dan distribusi hasil tambang batu bara bagi sejumlah perusahaan, antara lain PT Trubaindo Coal Mining dan PT Bharinto Ekatama yang bernaung di bawah PT Indo Tambangraya Megah Tbk (Banpu Group), serta PT Teguh Sinar Abadi dan PT Firman Ketaun Perkasa dari grup PT Bayan Resources Tbk. Kehadiran industri ekstraktif berskala besar ini bagaikan pedang bermata dua: menggerakkan perekonomian daerah melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), tetapi juga memicu berbagai tantangan sosial-ekonomi dan lingkungan.

Salah satu tantangan krusial adalah keterbatasan akses pendidikan tinggi. Fasilitas pendidikan dasar hingga menengah pertama tersedia melalui SDN 006 Melak dan SMPN 2 Muara Bunyut, tetapi desa ini tidak memiliki sekolah menengah atas/kejuruan maupun perguruan tinggi. Siswa yang ingin melanjutkan studi harus menempuh jarak jauh ke luar wilayah sehingga biaya transportasi dan operasional harian melonjak. Kondisi ini memperberat beban ekonomi keluarga, khususnya kalangan menengah ke bawah, dan meningkatkan risiko putus sekolah. Tingginya aktivitas pertambangan di sekitar pemukiman juga membentuk preferensi pragmatis sebagian anak muda untuk langsung bekerja sebagai buruh kasar demi penghasilan instan ketimbang menempuh pendidikan akademik. Padahal, pendidikan pada hakikatnya merupakan instrumen mendasar untuk melepaskan masyarakat dari belenggu ketimpangan dan menaikkan strata sosial secara berkelanjutan (Tilaar 2012).

Muara Bunyut dipilih sebagai lokasi penelitian karena berstatus wilayah Ring I, yakni wilayah yang bersinggungan langsung dengan fasilitas *jetty* dan jalur pengangkutan (*hauling*) utama PT Bharinto Ekatama.[2] Berbeda dari desa binaan lain, seperti Desa Besiq dan Bermai di Kecamatan Damai atau Desa Benangin I, II, dan V di Kecamatan Teweh Timur, desa ini menanggung paparan dampak ekologis dan sosial yang paling intensif sehingga seharusnya menjadi prioritas penyaluran program CSR. Di sinilah muncul paradoks pembangunan yang mendasari penelitian ini: wilayah industri bernilai ekonomi tinggi justru menghadapi persoalan keberlanjutan pendidikan akibat tiadanya sekolah lanjutan. Evaluasi program beasiswa PT Bharinto Ekatama menjadi penting untuk menguji apakah kedekatan geografis dengan pusat operasional tambang sejalan dengan ketepatan sasaran dan efektivitas intervensi CSR.

CSR hadir sebagai instrumen pembangunan yang strategis. Melalui konsep tanggung jawab sosial, korporasi tidak lagi bertindak semata-mata sebagai pencari keuntungan, tetapi sebagai aktor sosial yang berkewajiban

[2] Wilayah binaan perusahaan dikelompokkan dalam Ring I, II, dan III. Ring I adalah wilayah yang bersinggungan langsung dengan fasilitas jetty dan jalur hauling PT Bharinto Ekatama.

meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar (Wibisono 2007). Pelaksanaan CSR di Indonesia ditopang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada sektor pertambangan, kewajiban ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) yang mengamanatkan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dengan pilar pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi, dan lingkungan. Landasan ini selaras dengan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak peserta didik atas bantuan pendidikan berbasis prestasi atau keterbatasan ekonomi.

Menindaklanjuti kewajiban tersebut, PT Bharinto Ekatama menggulirkan Program Beasiswa Prestasi dua kali setahun (dua gelombang) bagi mahasiswa jenjang D3, S1, hingga S2 dari wilayah binaan Ring I, II, dan III di Kecamatan Damai, Kecamatan Melak, dan Kecamatan Teweh Timur. Di Kalimantan Timur, perusahaan mengalokasikan bantuan bagi 60 mahasiswa dengan anggaran sekitar Rp300.000.000,00 per tahun. Keberhasilan program intervensi sosial, bagaimanapun, tidak dapat diukur sebatas besarnya dana atau banyaknya penerima, melainkan dari sejauh mana program menjawab persoalan akar rumput, menjangkau sasaran secara tepat, dan menciptakan dampak jangka panjang.

Penelitian terdahulu tentang beasiswa CSR menyoroti evaluasi menyeluruh terhadap program (Sari & Biantari 2021), kontribusi program bagi kualitas sumber daya manusia di wilayah operasional perusahaan (Ningtyas et al. 2022), komitmen perusahaan dalam menjaga keberlanjutan program (Pondalus & Fawzi 2021), serta mekanisme seleksi dan ketepatan sasaran (Laila et al. 2022). Berbeda dari kajian-kajian tersebut, penelitian ini menelaah program pada satu desa berstatus Ring I di sektor batu bara dengan kerangka *fit model* David C. Korten, yang menitikberatkan derajat keselarasan (*degree of fit*) antara program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran (Izzah & Hertati 2024). Berdasarkan kerangka itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses implementasi program beasiswa PT Bharinto Ekatama di Desa Muara Bunyut.

Kerangka Dasar Teori

Model Kesesuaian Tiga Arah David C. Korten

Korten mengembangkan model kesesuaian implementasi melalui pendekatan proses pembelajaran (*learning process approach*). Menurut model ini, program pembangunan hanya mencapai tujuannya apabila terdapat keselarasan antara program yang dirancang, kemampuan organisasi yang melaksanakan, dan kondisi kelompok yang menjadi sasaran (Izzah & Hertati 2024). Karena itu, pendekatan ini dikenal sebagai konsep *three-way fit* atau kesesuaian tiga arah. Keberhasilan tidak dapat dilihat dari satu aspek saja, seperti besarnya anggaran atau baiknya rancangan program, sebab program yang

terencana baik belum tentu berhasil bila tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak didukung kemampuan organisasi pelaksana. Kegagalan dapat muncul bila keluaran program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, bila organisasi pelaksana tidak memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan program, atau bila persyaratan organisasi pelaksana tidak sesuai dengan kemampuan kelompok sasaran.

Kesesuaian Program dengan Kelompok Sasaran

Kesesuaian ini menunjukkan relevansi program terhadap kebutuhan penerima manfaat, yang dapat dilihat dari perencanaan program, tujuan program, dan dukungan anggaran. Program yang bersifat umum belum tentu memberikan hasil yang sama pada kelompok masyarakat dengan kondisi dan kebutuhan berbeda. Dalam penelitian ini, kesesuaian dilihat dari sejauh mana beasiswa menjawab kebutuhan pembiayaan pendidikan mahasiswa.

Kesesuaian Program dengan Organisasi Pelaksana

Kesesuaian ini berkaitan dengan kemampuan organisasi menjalankan tugas yang dituntut program, yang diamati melalui struktur atau tim pelaksana, prosedur pelaksanaan, serta kapasitas sumber daya manusia dan teknis. Yang terpenting bukan keberadaan struktur formal, melainkan kemampuan nyata organisasi memenuhi tuntutan program, mulai dari sosialisasi, pendaftaran, seleksi, verifikasi, penetapan, hingga penyaluran beasiswa.

Kesesuaian Kelompok Sasaran dengan Organisasi Pelaksana

Kesesuaian ini merupakan hubungan antara persyaratan yang ditetapkan organisasi dan kemampuan kelompok sasaran memenuhinya, dengan indikator ketepatan sasaran, kemampuan memenuhi persyaratan, serta partisipasi dan respons kelompok sasaran. Persyaratan yang terlalu sulit membuat kelompok yang sebenarnya membutuhkan program kesulitan mengaksesnya, sehingga program berisiko salah sasaran atau terkendala administrasi.

Beasiswa dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Beasiswa dipahami sebagai dukungan pendidikan bagi peserta didik untuk membantu keberlanjutan studinya, baik berupa bantuan pembiayaan maupun fasilitas pendidikan tertentu, yang dapat bersumber dari pemerintah, perusahaan, yayasan, maupun lembaga pendidikan (Kuswanto & Sa'adah 2022). Adapun CSR merupakan komitmen jangka panjang entitas bisnis untuk beroperasi secara etis dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan (Riadi 2024). Tanggung jawab perusahaan melampaui kewajiban ekonomi dan hukum kepada pemegang saham karena keberlangsungan usahanya bergantung pada dukungan para pemangku kepentingan (Ernawan 2014). Di Indonesia, kewajiban CSR bersifat mandatori, terutama bagi perusahaan pengelola sumber daya alam, berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang memuat sanksi administratif bertingkat bagi ketidakpatuhan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang termasuk prinsip dasar CSR menurut ISO

26000, digunakan dalam pembahasan untuk menilai keterbukaan pelaksanaan program.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sejalan dengan pandangan Sugiyono (2017), pendekatan kualitatif dilakukan pada kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang dinamika implementasi program beasiswa CSR PT Bharinto Ekatama di Desa Muara Bunyut, sedangkan sifat deskriptifnya bertujuan menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang prosedur seleksi, pola penyaluran manfaat, dan kendala pelaksanaan. Fokus penelitian dibatasi pada tiga hubungan kesesuaian dalam model Korten, yaitu program–kelompok sasaran, program–organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran–organisasi pelaksana.

Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan keterlibatan langsung atau keterkaitan erat dengan pelaksanaan program sehingga mewakili ketiga unsur model Korten. Terdapat sembilan informan: satu pengelola *Community Development* (Comdev) PT Bharinto Ekatama yang mewakili unsur program sekaligus organisasi pelaksana; Sekretaris Desa dan Staf Kasi Pemerintahan Desa Muara Bunyut yang mewakili koordinasi desa dengan perusahaan; serta dua orang tua dan empat mahasiswa penerima beasiswa yang mewakili kelompok sasaran.

Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi mencakup kondisi wilayah, karakteristik sosial, pola koordinasi desa–perusahaan, serta peninjauan proses pendaftaran daring melalui Google Form. Wawancara dilakukan tatap muka secara bertahap pada Januari hingga Maret 2026 setelah kesepakatan waktu dan tempat diperoleh melalui WhatsApp. Studi dokumentasi menghimpun dokumen jumlah penerima, nominal beasiswa, dan data wilayah dari Comdev dan pemerintah desa. Data sekunder berupa jurnal, buku, laporan, dan dokumen yang relevan (Sugiyono 2017). Data dianalisis dengan model Miles dan Huberman (1994) melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data dalam uraian naratif dan tabel tematik, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Muara Bunyut memiliki luas 43,17 km² dan berada di jalur perlintasan hulu Sungai Mahakam (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat 2025). Selain sebagai pusat aktivitas ekonomi perairan, desa ini merupakan kawasan industri aktif dengan operasi pertambangan batu bara dan fasilitas *jetty*. Menurut Staf Kasi Pemerintahan (wawancara, 2026), jumlah penduduk mencapai 1.019 jiwa (528 laki-laki dan 491 perempuan) dalam 335 kepala keluarga. Wilayah desa terbagi atas empat RT dalam dua zona, yaitu bantaran

sungai (RT 01 dan RT 02) dan dataran tinggi (RT 03 dan RT 04), yang membentuk pola permukiman, pemanfaatan lahan, dan interaksi sosial yang berbeda.

Profil Program Beasiswa PT Bharinto Ekatama

Beasiswa prestasi PT Bharinto Ekatama bukan inisiatif sukarela semata, melainkan pelaksanaan PPM yang menjadi kewajiban perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Menurut Kristinawati dari Comdev, perusahaan wajib menjalankan delapan pilar PPM, salah satunya pendidikan, dan program beasiswa dimasukkan secara resmi ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) setiap tahun. Program ini telah berjalan sejak perusahaan berdiri. Setelah bergabung pada September 2022, informan mengevaluasi program dan mendapati sejumlah aspek pengelolaan belum terdokumentasi dengan baik; sepanjang 2023–2025 manajemen memperbaiki sistem pendataan penerima agar pengelolaan lebih rapi, tepat sasaran, dan transparan.

Program ditujukan bagi mahasiswa D3, S1, hingga S2 yang berdomisili di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah pada wilayah binaan Ring I, II, dan III, yaitu Kecamatan Damai (antara lain Desa Besiq dan Bermai), Kecamatan Melak (antara lain Desa Muara Bunyut), dan Kecamatan Teweh Timur (antara lain Desa Benangin I, II, dan V) (PT Bharinto Ekatama 2026). Perusahaan menerapkan sistem kuota dan gelombang: jumlah penerima direncanakan setiap tahun dan pendaftaran dibagi menjadi dua gelombang, dengan gelombang pertama umumnya dibuka pada Februari–April. Untuk Kalimantan Timur tersedia kuota 60 mahasiswa dengan anggaran sekitar Rp300.000.000,00, dan nominal bantuan sebesar Rp5.000.000,00 per mahasiswa per tahun. Jumlah penerima berfluktuasi (Tabel 1) karena, menurut Comdev, bergantung pada jumlah pendaftar dan keberhasilan peserta melewati seleksi akademik, terutama mempertahankan IPK minimal 3,25.

Tabel 1. Jumlah Penerima Beasiswa Berprestasi PT Bharinto Ekatama

Periode	2019–2022	2023	2024	2025
Jumlah penerima (orang)	111	89	148	80

Sumber: Brosur Program Pengembangan di Masyarakat PT Bharinto Ekatama dan wawancara (2026)

Pendaftaran dan verifikasi berkas dilakukan secara digital melalui Google Form yang memuat persyaratan (Tabel 2). Pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan otomatis dinyatakan tidak lolos tanpa komunikasi lanjutan, tetapi selama masa pendaftaran masih dibuka (misalnya 28 Februari–2 April) pendaftar dengan berkas kurang masih dapat memperbaiki atau mengonfirmasi. Setelah pendaftaran ditutup tidak ada lagi perbaikan, dan perusahaan mengumumkan hasil seleksi secara terbuka, termasuk persyaratan yang tidak terpenuhi oleh peserta yang tidak lolos.

Tabel 2. Syarat Pendaftaran Program Beasiswa

No	Persyaratan	Keterangan
1	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Minimal 3,25
2	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Fotokopi
3	Kartu Keluarga (KK)	Fotokopi
4	Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	Fotokopi
5	Surat keterangan aktif kuliah	Dari perguruan tinggi
6	Transkrip nilai	Telah dilegalisir
7	Surat rekomendasi	Dari kantor desa
8	Fakta integritas	Diisi dan diunduh melalui barcode
9	Surat permohonan beasiswa	Disertai foto 3×4 (diunduh melalui barcode)
10	Rekening Bank BRI	Wajib dimiliki (jika tidak, gugur verifikasi)

Sumber: Brosur Syarat Pendaftaran Beasiswa Bharinto Ekatama

Kesesuaian Program dengan Kelompok Sasaran

Menurut Kristinawati, beasiswa merupakan turunan kewajiban PPM sehingga Muara Bunyut, sebagai wilayah binaan, otomatis masuk dalam program: "program itu memang program turunan yang memang harus dilaksanakan oleh perusahaan, yang memang sudah kita cantumkan di dalam RKAB" (wawancara, 23 Januari 2026). Sekretaris Desa, Riyadi, menilai program "sangat sesuai untuk mahasiswa yang berasal terutama dari Desa Muara Bunyut" karena membantu masyarakat, terutama orang tua mahasiswa (wawancara, 26 Februari 2026). Para orang tua menyampaikan hal serupa. Gerisya Imelda menyebut beasiswa "banyak membantu orang tua yang kurang mampu untuk membiayai anaknya kuliah" (wawancara, 24 Februari 2026), sedangkan Salamawati menyatakan bantuan itu "cukup membantu dalam meringankan biaya SPP kuliah anak saya" (wawancara, 25 Februari 2026).

Dari sisi mahasiswa, Mayrin menyebut manfaat utamanya untuk membantu orang tua membayar SPP dan biaya kuliah (wawancara, 7 Maret 2026), sementara Nando menambahkan bahwa dana itu juga membantu biaya penunjang seperti tugas kuliah (wawancara, 28 Februari 2026). Mila merasakan manfaat sejak pertama menerima hingga sekarang, dan Luis merasa sangat terbantu dalam pembayaran SPP. Program dengan demikian menjawab kebutuhan pokok pembiayaan kuliah, meskipun para informan menyebutnya sebagai bantuan yang "cukup membantu" dan bukan penanggung seluruh biaya. Temuan ini sejalan dengan Laila et al. (2022) yang menunjukkan bahwa beasiswa CSR tidak hanya memberi bantuan finansial, tetapi juga meningkatkan semangat belajar penerima.

Kesesuaian Program dengan Organisasi Pelaksana

Program dijalankan unit Comdev yang bertanggung jawab atas sosialisasi, seleksi administrasi, hingga penyaluran bantuan, dengan dukungan pemerintah desa dalam penyampaian informasi. Kristinawati menjelaskan bahwa perencanaan dilakukan setiap tahun dengan menetapkan target jumlah penerima yang dibagi dalam dua *batch*; ketika *batch* dibuka, perusahaan lebih dahulu memberi tahu pengurus desa dan mengarahkan calon peserta ke Instagram atau tautan pendaftaran (wawancara, 23 Januari 2026). Pola penyampaian informasi berjenjang ini ditegaskan Riyadi: pemerintah desa menginformasikan program kepada masyarakat, terutama orang tua mahasiswa, dan menyampaikan persyaratan perusahaan, khususnya standar IPK, serta memberikan rekomendasi sesuai ketentuan perusahaan (wawancara, 26 Februari 2026).

Penerima manfaat menilai kualitas komunikasi ini baik. Gerisya Imelda menyebut berbagai pertemuan menjelaskan program dengan jelas (wawancara, 24 Februari 2026), Salamawati menilai komunikasi "cukup baik" (wawancara, 25 Februari 2026), dan Nando menyatakan perusahaan "memberi informasi yang sangat jelas melalui IG dengan menggunakan Google Form" (wawancara, 28 Februari 2026). Mayrin, Mila, dan Luis juga menilai informasi dari perusahaan jelas. Kombinasi kanal digital dan tatap muka ini meminimalkan kesenjangan informasi antara perusahaan, orang tua, dan mahasiswa serta menjaga transparansi proses, sejalan dengan penekanan Pondalus & Fawzi (2021) pada komitmen perusahaan dalam implementasi CSR beasiswa.

Dalam kerangka Korten, kesesuaian ini tidak semata-mata ditentukan struktur formal, tetapi oleh kapasitas nyata menjalin koordinasi lintas pihak. Peran pemerintah desa sebagai penyalur informasi sekaligus pemberi motivasi memperlihatkan bahwa fungsi koordinasi dapat melibatkan aktor di luar organisasi pelaksana inti, hal yang tidak ditekankan dalam uraian model yang dirujuk penelitian ini. Kesesuaian tersebut juga bersifat dinamis, sebab perusahaan menyesuaikan saluran komunikasinya dengan karakteristik kelompok sasaran.

Kesesuaian Kelompok Sasaran dengan Organisasi Pelaksana

Kristinawati menegaskan bahwa patokan utama penentuan penerima adalah wilayah binaan, sehingga sasaran utamanya adalah mahasiswa asli atau yang tinggal di sekitar area binaan, dengan syarat lolos penyaringan awal berupa kelengkapan berkas dan IPK minimal 3,25 (wawancara, 23 Januari 2026). Persyaratan itu dapat dipenuhi mahasiswa dengan dukungan pemerintah desa. Riyadi menyatakan bahwa desa terus memohon agar beasiswa dilanjutkan "selama perusahaan masih beroperasi di wilayah desa kami" dan mendorong mahasiswa meningkatkan kualitas pendidikan agar memenuhi standar (wawancara, 26 Februari 2026). Respons kelompok sasaran positif: baik Comdev maupun Sekretaris Desa menilai tanggapan mahasiswa dan orang tua sangat baik karena bantuan meringankan beban finansial keluarga.

Standar akademik juga berfungsi sebagai pendorong belajar. Gerisya Imelda melihat anaknya berprestasi karena "belajar dengan rutin dan disiplin", sedangkan Salamawati melihat anaknya "semakin rajin untuk mencapai target yang diberikan oleh perusahaan". Persyaratan IPK dengan demikian diterjemahkan mahasiswa menjadi target pribadi. Bagi keberlanjutan studi, Mayrin menyatakan beasiswa membantunya membayar SPP tetap dan SPP variabel dari tahun 2024 hingga 2026, Nando merasa terbantu untuk SPP dan biaya di luar perkuliahan seperti makalah atau skripsi, dan Luis menyatakan beasiswa meringankan SPP-nya. Temuan ini sejalan dengan penekanan Ningtyas et al. (2022) pada peran CSR pendidikan dalam memperluas akses pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah operasional perusahaan.

Kesesuaian Tiga Arah dan Celah Implementasi

Tiga poin kesesuaian yaitu program dengan kelompok sasaran, program dengan organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana saling menguatkan. Bantuan Rp5.000.000,00 per mahasiswa per tahun diterima sebagai peringan biaya SPP dan kebutuhan kuliah; Comdev menjalankan perencanaan tahunan dalam RKAB, sistem kuota dan dua gelombang, serta seleksi digital yang mampu memenuhi tuntutan program; dan persyaratan IPK minimal 3,25 serta kelengkapan berkas dapat dipenuhi mahasiswa dengan dukungan sosialisasi dan rekomendasi desa. Keselarasan ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas CSR, tampak dari pengumuman hasil seleksi beserta persyaratan yang tidak terpenuhi dan penyampaian informasi melalui kanal resmi perusahaan.

Meskipun demikian, pembacaan terhadap ketiga hubungan tersebut menunjukkan tiga celah. *Pertama*, cakupan kelompok sasaran. Program dirancang bagi mahasiswa wilayah binaan Ring I, II, dan III di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dengan kuota terbatas dan seleksi berbasis IPK, sehingga mahasiswa dari wilayah sekitar yang menghadapi kendala biaya serupa, atau yang belum mencapai standar akademik, tidak terjangkau. *Kedua*, peran organisasi pelaksana. Keterlibatan perusahaan yang diuraikan para informan terbatas pada sosialisasi, seleksi administrasi, dan penyaluran bantuan, sedangkan manfaat yang dirasakan penerima berkisar pada pembiayaan SPP dan kebutuhan kuliah; tidak ditemukan kegiatan pembinaan non-akademik seperti pendampingan berkala, pelatihan *soft skill*, atau pengembangan kepemimpinan. *Ketiga*, keberlanjutan program. Program dianggarkan melalui RKAB yang direncanakan setiap tahun, dan Sekretaris Desa sendiri rutin mengajukan permohonan agar program terus berlanjut, yang menunjukkan bahwa keberlanjutannya belum memiliki jaminan jangka panjang.

Dalam kerangka diagnostik Korten, ketiga celah tersebut tidak menunjukkan ketidaksesuaian yang mendasar, melainkan area penyempurnaan agar kesesuaian tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi berkembang

melalui pembelajaran organisasi (*learning process approach*) yang responsif terhadap kebutuhan penerima dan kondisi wilayah. Penelitian ini memiliki keterbatasan: informan hanya berasal dari perusahaan, pemerintah desa, serta sebagian kecil mahasiswa dan orang tua penerima di satu lokasi dan satu periode penyaluran; model Korten kurang menyediakan alat untuk mengukur keberlanjutan dampak jangka panjang, seperti kelulusan atau capaian karier penerima; dan data kuantitatif pembanding, seperti tingkat putus studi atau perubahan IPK sebelum dan sesudah menerima beasiswa, belum tersedia.

Kesimpulan dan Saran

Implementasi program beasiswa PT Bharinto Ekatama di Desa Muara Bunyut telah berjalan cukup baik dan menunjukkan keselarasan yang tinggi antara program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran dalam model Korten. *Pertama*, program dirancang sistematis sebagai bagian dari kewajiban perusahaan pemegang PKP2B dan tercantum dalam RKAB, dengan tujuan yang jelas, yaitu meringankan beban finansial mahasiswa, meningkatkan semangat belajar, dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, serta kriteria penerima yang konkret berupa IPK minimal 3,25 dan kelengkapan berkas. *Kedua*, unit Comdev mengelola program secara terstruktur, berkoordinasi dengan pemerintah desa, dan memanfaatkan Instagram serta Google Form sehingga komunikasi dengan masyarakat berjalan efektif. *Ketiga*, bantuan diterima kelompok sasaran yang tepat, yaitu mahasiswa wilayah binaan yang memenuhi persyaratan, dan terbukti meringankan biaya kuliah serta mendorong motivasi belajar.

Penelitian ini juga mengidentifikasi tiga celah, yaitu cakupan kelompok sasaran yang terbatas, peran organisasi pelaksana yang berfokus pada administrasi dan penyaluran dana, serta keberlanjutan program yang bergantung pada RKAB tahunan. Berdasarkan celah tersebut, PT Bharinto Ekatama disarankan (1) memperluas cakupan penerima secara bertahap kepada mahasiswa dari wilayah sekitar operasional yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan tinggi serupa; (2) mengembangkan pendampingan berkala bagi penerima, tidak hanya akademik tetapi juga *soft skill* dan karakter, melalui pertemuan rutin dan pelatihan kepemimpinan; dan (3) memperkuat komitmen jangka panjang, misalnya melalui kebijakan keberlanjutan multitahun. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan memperluas lokasi ke wilayah binaan lain, mengkaji beberapa periode penyaluran agar konsistensi kesesuaian dapat dilihat dari waktu ke waktu, serta melengkapi model Korten dengan kerangka evaluasi dampak jangka panjang, seperti *logic model* atau evaluasi *outcome*, dan data kuantitatif pembanding.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat. 2025. *Kecamatan Melak dalam Angka 2025*. Kutai Barat : BPS Kabupaten Kutai Barat.

Ernawan, E. 2014. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Performa*, 11 (2).

Izzah, Z., & Hertati, D. 2024. "Implementasi Program Padat Karya dalam Pengurangan Pengangguran di Kota Surabaya: Sebuah Analisis Berdasarkan Model David C. Korten." *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6 (1): 91–100. https://doi.org/10.52423/neores.v6i1.316

Kuswanto, D., & Sa'adah, N. 2022. "Efektivitas Program Beasiswa terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik SMP NU Darul Ma'arif." *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 3 (1).

Laila, F., Rachmawati, D., Lestari, F., & Pratiwi, A. D. 2022. "Program Beasiswa Prasejahtera Berprestasi (BEST) oleh Tim CSR PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pabrik Tuban." *Education: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2 (3): 76–90. https://doi.org/10.51903/education.v2i3.276

Miles, M. B., & Huberman, A. M. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA : Sage Publications.

Ningtyas, C. P., Kambolong, M., & Makmur, M. 2022. "Implementasi Corporate Social Responsibility pada PT. Aneka Tambang Tbk. UBPN Sulawesi Tenggara." *Journal Publicuho*, 5 (4): 1011–1022. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.50

Pondalus, A. M., & Fawzi, I. L. 2021. "Komitmen Perusahaan dalam Implementasi Program CSR Beasiswa Pendidikan PT Krakatau Steel yang Bermitra dengan LP3I Cilegon, Banten." *Jurnal Pembangunan Manusia*, 2 (1). https://doi.org/10.7454/jpm.v2i1.1012

PT Bharinto Ekatama [@pt.bharinto_ekatama]. 2026. "Pengumuman Beasiswa PT Bharinto Ekatama Batch 1 Tahun 2026." Unggahan Instagram, 27 Februari.

Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

_____. 2007a. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.

_____. 2007b. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

_____. 2020. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Riadi, M. 2024. *Corporate Social Responsibility (CSR) – Pengertian, Aspek dan Program*. KajianPustaka.com. https://www.kajianpustaka.com/2023/05/corporate-social-responsibility-csr.html

Sari, D. R., & Biantari, A. 2021. "Evaluasi Program Bidiksiba dari CSR PT Bukit Asam, Tbk." *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2 (7). https://doi.org/10.36418/jiss.v2i7.370

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Tilaar, H. A. R. 2012. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.

Wibisono, Y. 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Fascho Publishing.